

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin Farid, A.Z., dan A. Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Danil, H. Elwi, 2014, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH UMY, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harsono, C.I., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Masduki, Teten dan A. Muktie Fadjar, 2003, *Menyingkap Korupsi di Daerah*, In-Trans, Malang.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

- Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co., Jakarta.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyanto, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sukidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 810).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

### C. Internet dan Karya Ilmiah

Egeham, Lizsa, "Lapas Sukamiskin Usulkan Nazaruddin Bebas Bersyarat", *www.liputan6.com*, 5 April 2018.

Eva Mazrieva, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90", *www.voaindonesia.com*, 15 September 2017.

Hanum, Arinal Nurrisyad, 2012, "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto", *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Hiariej, Eddy O.S., "Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat", *Kompas*, 26 Juli 2013.

Jokowi dan Jusuf Kalla, "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Visi Misi, dan Program Aksi", *www.kpu.go.id*, 20 November 2017.

KPK, "Akil Mochtar Terjerat Suap Dua Sengketa Pilkada", *www.kpk.go.id*, 24 November 2017.

Nasution, Novia Nur Annisa, 2016, "Pengaturan dan Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Tertentu", *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pramudika, Pekik, "Pembebasan Bersyarat Jaksa Urip: Hak Narapidana atau Celah Hukum?", *www.calonsh.com*, 25 September 2017.

Transparency Internasional Indonesia, "Corruption Perceptions Index 2016, Terus Perkuat Integritas Sektor Publik, Dorong Integritas Bisnis Sektor Swasta", *www.ti.or.id*, 15 September 2017.



Tuk Indonesia, “38 Koruptor Mendapat Pembebasan Bersyarat Selama Pemerintahan SBY”, *www.tuk.or.id*, 5 April 2018.

Usman, Imam Basofi, 2014, “Dasar Pertimbangan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.